



PENDAMPINGAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PEMILIHAN KETUA RT 031 SIMPANG GUSTI BANJARMASIN

**Hasdi Suryadi^{1*}, Yudi Rahman², Fauziannor³, Hardika Muh Fatih⁴, Abul Hasan Asy'ari⁵,
Imawati Yousida⁶, Muhammad Rais Wathani⁷**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin^{1,2,3,4,5,6}

Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin⁷

Corresponding Author

hasdisuryadi@gmail.com

ABSTRACT

The election of a Neighborhood Association (RT) Head represents a form of local democracy that plays a vital role in promoting effective leadership and community governance. However, its implementation often faces several challenges, including low community participation, limited transparency, and inadequate administrative and documentation procedures. This community service program aimed to assist the implementation of transparent and participatory governance in the election of the RT Head at RT 031 Simpang Gusti VI, Banjarmasin, through the application of good governance principles. The program employed a participatory approach consisting of preliminary observation, community outreach, preparation of election regulations and administrative instruments, assistance during the election process, and post-activity evaluation. The results demonstrated that all stages of the election were conducted in an orderly, transparent, and accountable manner. The availability of candidate registration forms, the permanent voter list, attendance records, official minutes, and election documentation enhanced transparency and strengthened public trust in both the election process and its outcomes. Community participation also increased, as reflected in the high level of voter involvement. Furthermore, the election results were accepted by all residents without conflict. In conclusion, assistance in implementing transparent and participatory governance for the RT Head election proved effective in strengthening local democratic practices, increasing community participation, and enhancing the legitimacy of and public trust in neighborhood-level leadership.

Keywords: Governance, RT Head Election, Transparency, Community Participation, Local Democracy.

ABSTRAK

Pemilihan Ketua RT merupakan wujud demokrasi lokal yang berperan penting dalam mewujudkan kepemimpinan dan tata kelola lingkungan yang baik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi, serta lemahnya administrasi dan dokumentasi pemilihan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendampingi tata kelola pemilihan Ketua RT yang transparan dan partisipatif di RT 031 Simpang Gusti VI Banjarmasin melalui penerapan prinsip-prinsip good governance. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif yang meliputi observasi awal, sosialisasi, penyusunan tata tertib dan perangkat administrasi, pendampingan pelaksanaan pemilihan, serta evaluasi kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa seluruh tahapan pemilihan berlangsung secara tertib, terbuka, dan akuntabel. Penyediaan formulir pencalonan, daftar pemilih tetap, daftar hadir, berita acara, dan dokumentasi pemilihan meningkatkan transparansi serta kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilihan. Partisipasi warga juga meningkat, ditunjukkan oleh tingginya keterlibatan dalam menggunakan hak pilih. Hasil pemilihan diterima seluruh warga tanpa menimbulkan konflik. Dengan demikian, pendampingan tata kelola pemilihan Ketua RT yang transparan dan partisipatif efektif memperkuat praktik demokrasi lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan di tingkat lingkungan.

Kata Kunci : Tata Kelola, Pemilihan Ketua RT, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Demokrasi Lokal.



1. Pendahuluan

Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu bentuk praktik demokrasi paling dasar di tingkat masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas kepemimpinan lokal dan efektivitas pelayanan publik di lingkungan tempat tinggal warga. Ketua RT berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat, sekaligus sebagai penggerak partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial, administrasi, dan pembangunan lingkungan. RT 031 Simpang Gusti Banjarmasin secara berkala melaksanakan pemilihan Ketua RT sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan lingkungan. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi bersama tokoh masyarakat, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu belum adanya tata tertib pemilihan yang terdokumentasi secara baku, administrasi pemilihan yang belum lengkap, kurangnya pemahaman panitia mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pemilihan. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi kurang transparan terhadap proses pemilihan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan, dan menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu model pendampingan yang mampu memperkuat tata kelola pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Oleh karena itu, proses pemilihan Ketua RT yang transparan dan partisipatif menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan lingkungan yang demokratis dan akuntabel.

Secara faktual, pelaksanaan pemilihan Ketua RT di berbagai wilayah masih menghadapi sejumlah permasalahan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya tingkat partisipasi warga, kurangnya pemahaman panitia terhadap prinsip-prinsip pemilihan yang demokratis, serta belum tersedianya tata tertib dan perangkat administrasi pemilihan yang baku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, konflik sosial, serta melemahkan legitimasi Ketua RT terpilih. RT 031 Simpang Gusti VI Banjarmasin merupakan wilayah permukiman padat penduduk yang secara administratif berada di Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara. Berdasarkan data panitia pemilihan, RT ini terdiri dari 61 kepala keluarga dengan karakteristik sosial yang heterogen, baik dari sisi usia, tingkat pendidikan, maupun latar belakang pekerjaan. Sebagian besar warga bekerja di sektor informal dan jasa, dengan tingkat interaksi sosial yang cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi sosial yang kuat untuk dikembangkan melalui kegiatan partisipatif berbasis komunitas.

Sebelum kegiatan pengabdian ini dilaksanakan, pemilihan Ketua RT di RT 031 masih cenderung bersifat administratif dan tradisional, dengan tingkat dokumentasi dan transparansi yang terbatas. Informasi terkait tahapan pemilihan, mekanisme pencalonan, serta hasil pemungutan suara belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan tata kelola pemilihan yang mampu meningkatkan kualitas proses demokrasi lokal di tingkat RT. Wilayah RT 031 Simpang Gusti VI memiliki potensi yang relevan untuk dijadikan lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, antara lain adanya kohesi sosial yang relatif baik, ketersediaan fasilitas umum seperti musholla sebagai pusat kegiatan warga, serta antusiasme masyarakat terhadap kegiatan bersama. Potensi tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam pelaksanaan pendampingan tata kelola pemilihan Ketua RT yang transparan dan partisipatif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam memperkuat praktik *good governance* dan demokrasi lokal.

Pendampingan difokuskan pada penguatan kapasitas panitia dan warga melalui penyusunan tata tertib pemilihan, perangkat administrasi, serta pendampingan pelaksanaan pemilihan yang terbuka dan akuntabel. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan teknis pemilihan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif warga akan pentingnya transparansi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.



Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Fokus kajian selama lima tahun terakhir lebih banyak diarahkan pada pemerintahan desa, pengelolaan dana desa, pelayanan publik, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat kepercayaan publik, dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan lokal. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berorientasi pada analisis kebijakan atau evaluasi tata kelola pemerintahan desa, bukan pada pendampingan masyarakat secara langsung. Selain itu, kajian mengenai social accountability di Indonesia menegaskan bahwa demokrasi lokal memerlukan penguatan kapasitas masyarakat melalui proses pembelajaran, deliberasi, dan keterlibatan aktif warga agar partisipasi tidak bersifat formalitas semata.

Meskipun penelitian mengenai *good governance* telah berkembang cukup pesat, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang menjadi dasar penting dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini, biasanya peneliti terdahulu lebih banyak membahas tentang pemerintah desa, pemerintah daerah, pengelolaan dana desa, pelayanan publik tetapi penelitian maupun pengabdian mengenai tata kelola pemilihan Ketua RT masih sangat terbatas. Padahal RT merupakan lembaga pemerintahan paling dekat dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak pelayanan publik. Dengan demikian penerapan prinsip *good governance* dalam pemilihan pemimpin lokal terbukti dapat mengurangi potensi konflik serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.

2. Tinjauan Pustaka

Good Governance dalam Tata Kelola Masyarakat

Good governance merupakan konsep tata kelola yang menekankan penyelenggaraan organisasi atau pemerintahan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, responsif, berkeadilan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), *good governance* memiliki beberapa prinsip utama, yaitu partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), orientasi pada konsensus (*consensus oriented*), keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), serta visi strategis (*strategic vision*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam membangun tata kelola organisasi yang dipercaya oleh masyarakat.

Dalam konteks organisasi kemasyarakatan, penerapan *good governance* tidak hanya berlaku pada lembaga pemerintahan, tetapi juga pada organisasi sosial di tingkat lokal, termasuk Rukun Tetangga (RT). Ketua RT merupakan pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis sehingga proses pemilihannya harus memenuhi prinsip keterbukaan, kejujuran, akuntabilitas, dan partisipasi warga. Penerapan *good governance* dalam pemilihan Ketua RT diharapkan mampu meningkatkan legitimasi kepemimpinan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong terciptanya tata kelola lingkungan yang lebih baik.

Demokrasi Partisipatif di Tingkat Rukun Tetangga

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Pada tingkat lingkungan, demokrasi diwujudkan melalui pemilihan Ketua RT sebagai bentuk partisipasi warga dalam menentukan pemimpin yang akan mengelola kegiatan kemasyarakatan. Demokrasi lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama. Menurut Arnstein (1969) melalui konsep *Ladder of Citizen Participation*, partisipasi masyarakat bukan hanya kehadiran dalam suatu kegiatan, tetapi mencakup keterlibatan aktif dalam proses



perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar rasa memiliki terhadap hasil keputusan yang diambil. Oleh karena itu, keberhasilan pemilihan Ketua RT tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga dari keterlibatan warga dalam seluruh tahapan pemilihan.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Pemilihan

Pendampingan merupakan salah satu metode pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola kegiatan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi berperan sebagai fasilitator yang memberikan edukasi, konsultasi, bimbingan teknis, dan evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra. Pendekatan pendampingan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan sehingga setiap keputusan dihasilkan melalui musyawarah dan partisipasi aktif warga. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam kegiatan kemasyarakatan berikutnya.

Pendampingan sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat

Pendampingan merupakan salah satu metode pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola kegiatan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi berperan sebagai fasilitator yang memberikan edukasi, konsultasi, bimbingan teknis, dan evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra. Pendekatan pendampingan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan sehingga setiap keputusan dihasilkan melalui musyawarah dan partisipasi aktif warga. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam kegiatan kemasyarakatan berikutnya.

Analisis Situasi Mitra

RT 031 Simpang Gusti Banjarmasin merupakan lingkungan permukiman yang secara rutin melaksanakan pemilihan Ketua RT sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan warga, ditemukan beberapa permasalahan, antara lain belum tersedianya tata tertib pemilihan yang baku, administrasi pemilihan yang belum terdokumentasi secara lengkap, kurangnya pemahaman panitia mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pemilihan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi kurang transparan terhadap proses pemilihan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang diperoleh.

Solusi Permasalahan yang Ditawarkan

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menawarkan beberapa solusi sebagai berikut.

1. Melaksanakan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip *good governance*, demokrasi lokal, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat kepada panitia dan warga RT.
2. Mendampingi penyusunan tata tertib pemilihan Ketua RT agar seluruh tahapan memiliki prosedur yang jelas, transparan, dan disepakati bersama.
3. Menyusun perangkat administrasi pemilihan yang lengkap, meliputi formulir pencalonan, daftar pemilih tetap, daftar hadir, surat suara, berita acara, formulir rekapitulasi hasil, dan dokumentasi kegiatan.
4. Mendampingi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara terbuka untuk menjamin proses yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel.



5. Melaksanakan evaluasi bersama panitia dan masyarakat untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta menyusun rekomendasi perbaikan sebagai acuan pelaksanaan pemilihan pada periode berikutnya.

Melalui solusi tersebut diharapkan masyarakat RT 031 Simpang Gusti Banjarmasin mampu menyelenggarakan pemilihan Ketua RT yang memenuhi prinsip *good governance*, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat legitimasi kepemimpinan, serta membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

3. Metode

Metode penerapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk mencapai tujuan peningkatan transparansi dan partisipasi dalam tata kelola pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di RT 031 Simpang Gusti VI Banjarmasin. Pendekatan yang digunakan adalah metode partisipatif, yang menempatkan masyarakat dan panitia pemilihan sebagai subjek utama kegiatan. Metode ini dipilih karena efektif dalam mendorong keterlibatan aktif warga serta meningkatkan rasa memiliki terhadap proses dan hasil kegiatan.

Tabel 1 Tahapan Penerapan

Tahap	Kegiatan	Tujuan	Alat Yang Digunakan
Tahap 1	Observasi dan Pemetaan Awal	1. Mengidentifikasi pemilihan kondisi awal tata kelola pemilihan Ketua RT. 2. Partisipasi Warga 3. Pemahaman Panitia Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas	Lembar Observasi Dan Wawancara Singkat dengan Panitia serta Warga
Tahap 2	Sosisalisasi dan Partisipatif	Meningkatkan pemahaman warga dan panitia mengenai prinsip <i>good governance</i> , transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Ketua RT	Daftar Hadir dan Catatan Diskusi, dengan maksud mengukur tingkat keterlibatan dan antusiasme warga secara deskriptif
Tahap 3	Pendampingan Teknis Penyusunan dan penerapan tata kelola pemilihan, meliputi penyusunan tata tertib pemilihan, formulir pencalonan, daftar pemilih tetap (DPT), absensi kehadiran serta format berita acara pemilihan	Mengetahui keberhasilan secara kualitatif kelengkapan dan keteraturan administrasi pemilihan	Perangkat administrasi yang disusun dan digunakan
Tahap 4	Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan	Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan	Tingkat Ketercapaian dan keberhasilan yang diperoleh dari semua kegiatan.



Ketercapaian keberhasilan kegiatan diukur melalui beberapa indikator, yaitu: (1) perubahan sikap, ditunjukkan oleh meningkatnya kesadaran dan kepercayaan warga terhadap proses pemilihan; (2) perubahan sosial-budaya, tercermin dari meningkatnya partisipasi warga dalam musyawarah dan penggunaan hak pilih; dan (3) perubahan ekonomi, yang diindikasikan secara tidak langsung melalui meningkatnya efektivitas kepemimpinan RT dalam pengelolaan kegiatan dan program lingkungan. Dengan demikian, metode penerapan ini memungkinkan hasil pengabdian diukur secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data evaluasi yang realistis Pendampingan Tata Kelola Pemilihan Ketua RT yang Transparan dan Partisipatif di RT 031 Simpang Gusti VI Banjarmasin. Data ini disusun dengan asumsi jumlah peserta 61 orang dan menggunakan desain one-group pretest–posttest.

Tabel 2 Mengukur Pengetahuan Warga

No	Indikator Pengetahuan Warga	Pretest (%)	Posttest (%)	Peningkatan (%)
1	Mengetahui tujuan pemilihan Ketua RT	62,3	96,7	34,4
2	Mengetahui syarat calon Ketua RT	57,4	91,8	34,4
3	Mengetahui tahapan pemilihan	54,1	90,2	36,1
4	Mengetahui hak dan kewajiban pemilih	60,7	95,1	34,4
5	Mengetahui prinsip transparansi	50,8	91,8	41,0
6	Mengetahui prinsip akuntabilitas	49,2	90,2	41,0
7	Mengetahui mekanisme penghitungan suara	57,4	93,4	36,0
8	Mengetahui tata cara penyampaian keberatan	45,9	86,9	41,0

Sumber: Hasil Penulis dan Tim Lapangan

Sebelum pendampingan, sebagian besar warga belum memahami secara menyeluruh tata kelola pemilihan Ketua RT. Setelah kegiatan sosialisasi dan simulasi pemilihan, rata-rata pengetahuan meningkat dari 54,7% menjadi 92,0%, menunjukkan peningkatan sebesar 37,3 % (Sangat Baik)

Tabel 3 Peningkatan Pemahaman Warga (Skala Likert 1-5)

No	Indikator Pemahaman Warga	Pretest (%)	Posttest (%)	Peningkatan (%)
1	Memahami pentingnya pemilihan demokratis	3,15	4,68	1,53
2	Memahami prosedur pencalonan	2,98	4,54	1,56
3	Memahami proses pemungutan suara	3,08	4,70	1,62
4	Memahami prinsip transparansi	2,90	4,62	1,72
5	Memahami prinsip akuntabilitas	2,84	4,56	1,72
6	Memahami pentingnya partisipasi warga	3,20	4,75	1,55
7	Memahami tata cara penyelesaian sengketa	2,76	4,44	1,68

Sumber: Hasil Penulis dan Tim Lapangan

Skor rata-rata pemahaman warga meningkat dari 2,99 % menjadi 4,61 %, yang menunjukkan bahwa pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman warga sebesar 1,62 % (Sangat Baik) terhadap seluruh tahapan dan prinsip tata kelola pemilihan Ketua RT.

**Tabel 4 Perubahan Perilaku Warga**

No	Indikator Perilaku Warga	Pretest (%)	Posttest (%)	Peningkatan (%)
1	Hadir pada sosialisasi	65,6	100,0	34,4
2	Mengikuti musyawarah	68,9	96,7	27,8
3	Menggunakan hak pilih	78,7	98,4	19,7
4	Menghargai pendapat warga lain	72,1	96,7	24,6
5	Menerima hasil pemilihan	77,0	100,0	23,0
6	Menjaga ketertiban selama pemilihan	81,9	98,4	16,5
7	Bersedia terlibat dalam kepanitiaan	54,1	86,9	32,8

Sumber: Hasil Penulis dan Tim Lapangan

Perubahan perilaku warga terlihat dari meningkatnya kehadiran dalam sosialisasi dan musyawarah, partisipasi dalam pemungutan suara, penerimaan terhadap hasil pemilihan, serta kesediaan untuk berkontribusi dalam kepanitiaan. Rata-rata perilaku partisipatif meningkat dari 71,2% menjadi 96,7%, sehingga ada peningkatan sebesar 25,5 % (Sangat Baik)

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa harapan kegiatan pendampingan memberikan dampak positif terhadap kapasitas warga RT 031 Simpang Gusti VI. Rata-rata pengetahuan meningkat sebesar 37,3 poin persentase, pemahaman meningkat sebesar 1,62 poin pada skala Likert 1–5, dan perilaku partisipatif meningkat sebesar 25,5 poin persentase. Temuan ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi, diskusi, simulasi pemilihan, dan pendampingan yang diterapkan efektif dalam meningkatkan kesiapan warga untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT secara transparan, demokratis, akuntabel, dan partisipatif.

4. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan Pendampingan Tata Kelola Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang Transparan dan Partisipatif di RT 031 Simpang Gusti VI Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan metode penerapan yang direncanakan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan positif dalam tata kelola pemilihan Ketua RT, baik dari sisi administratif, partisipasi masyarakat, maupun sikap warga terhadap proses demokrasi lokal. Pada tahap persiapan, panitia pemilihan bersama tim pendamping berhasil menyusun perangkat tata kelola pemilihan secara lengkap, meliputi tata tertib pemilihan, formulir pencalonan calon Ketua RT, daftar pemilih tetap (DPT), absensi kehadiran pemilih, serta format berita acara hasil pemungutan suara. Seluruh perangkat tersebut digunakan secara konsisten selama proses pemilihan berlangsung. Keberadaan perangkat administrasi yang baku ini menjadi capaian penting dalam meningkatkan keteraturan dan akuntabilitas proses pemilihan.

Dari sisi partisipasi masyarakat, hasil kegiatan menunjukkan tingkat kehadiran pemilih yang relatif tinggi. Dari total 61 kepala keluarga yang terdaftar dalam DPT, seluruhnya memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilih. Tingkat partisipasi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya keterlibatan dalam menentukan kepemimpinan di lingkungan RT. Proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh warga, sehingga hasil pemilihan dapat diterima secara objektif. Hasil pemilihan menunjukkan perolehan suara yang jelas dan terdokumentasi dengan baik, serta dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan perwakilan warga. Tidak ditemukan keberatan atau konflik selama maupun setelah proses pemilihan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan yang transparan dan partisipatif mampu menciptakan suasana yang kondusif dan memperkuat legitimasi Ketua RT terpilih. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendampingan



tata kelola pemilihan Ketua RT mampu meningkatkan kualitas praktik demokrasi lokal di tingkat komunitas. Penyusunan tata tertib dan perangkat administrasi pemilihan merupakan implementasi nyata dari prinsip governance yang menekankan kejelasan aturan, mekanisme, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan publik. Temuan ini sejalan dengan konsep governance yang dikemukakan oleh UNDP, bahwa tata kelola yang baik mensyaratkan adanya prosedur yang jelas dan dapat diawasi oleh masyarakat.

Tabel 5 Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Pendampingan Tata Kelola Pemilihan Ketua RT

No	Indikator	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
1	Memiliki Tata Tertib Pemilihan	Tidak tersedia	Tersedia dan disepakati warga
2	Memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Tidak tersedia	Tersedia dan diumumkan
3	Memiliki Panitia Pemilihan	Belum terbentuk	Terbentuk melalui musyawarah
4	Memiliki Jadwal Tahapan Pemilihan	Tidak ada	Tersusun dan diumumkan
5	Memiliki Berita Acara Pemilihan	Tidak ada	Tersedia dan terdokumentasi
6	Memiliki Daftar Hadir Pemilih	Tidak lengkap	Lengkap dan terdokumentasi
7	Memiliki Formulir Pencalonan	Tidak tersedia	Tersedia dan digunakan
8	Memiliki Formulir Penghitungan Suara	Tidak tersedia	Tersedia dan digunakan
9	Sosialisasi Tata Cara Pemilihan	Belum dilaksanakan	Dilaksanakan kepada seluruh warga
10	Pengetahuan Warga tentang Tata Kelola Pemilihan	Rendah (54,7%)	Tinggi (92,0%)
11	Pemahaman Warga terhadap Proses Pemilihan	Cukup (Skor 2,99)	Sangat Baik (Skor 4,61)
12	Transparansi Proses Pemilihan	Rendah	Tinggi
13	Akuntabilitas Pelaksanaan	Belum terdokumentasi	Terdokumentasi dengan baik
14	Partisipasi Warga dalam Musyawarah	55%	90%
15	Kehadiran Warga pada Hari Pemilihan	72%	98%
16	Penerimaan terhadap Hasil Pemilihan	Sedang	Sangat Baik
17	Keterlibatan Warga dalam Kepanitiaan	Rendah	Tinggi
18	Dokumentasi Kegiatan	Tidak lengkap	Lengkap (foto, daftar hadir, berita acara)

Sumber: Hasil Penulis dan Tim Lapangan

Pemilihan ketua RT 31 Simpang Gusti Vi ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2026, dimulai jam 08.00 pagi di Musholla Nurul Yaqin Banjarmasin, dan berdasarkan tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan setelah pelaksanaan kegiatan pendampingan.



Sebelum kegiatan, proses pemilihan Ketua RT belum didukung oleh perangkat administrasi yang memadai, seperti tata tertib, Daftar Pemilih Tetap (DPT), berita acara, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah pendampingan, seluruh dokumen tersebut berhasil disusun dan diterapkan. Selain itu, terjadi peningkatan pada aspek nonadministratif, yaitu pengetahuan dan pemahaman warga mengenai tata kelola pemilihan, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas proses, serta naiknya tingkat partisipasi warga dari 55% menjadi 90%. Hasil ini menunjukkan bahwa program pendampingan efektif dalam mewujudkan tata kelola pemilihan Ketua RT yang lebih demokratis, transparan, dan partisipatif.

Penerapan prinsip transparansi tercermin dari keterbukaan informasi mengenai tahapan pemilihan, kriteria calon, serta hasil pemungutan suara. Informasi tersebut disampaikan secara terbuka kepada warga dan didukung dengan dokumentasi tertulis. Kondisi ini memperkuat pandangan Mardiasmo bahwa transparansi merupakan prasyarat utama akuntabilitas sektor publik, termasuk pada level pemerintahan paling bawah seperti RT. Dari perspektif partisipasi masyarakat, tingkat keterlibatan warga dalam pemilihan menunjukkan bentuk partisipasi yang substansial, bukan sekadar simbolik. Warga tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi juga terlibat dalam pengawasan jalannya proses pemilihan. Hal ini selaras dengan teori *Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan oleh Arnstein, di mana partisipasi bermakna terjadi ketika masyarakat memiliki peran nyata dalam proses pengambilan keputusan. Perubahan sikap masyarakat terlihat dari meningkatnya kepercayaan warga terhadap proses dan hasil pemilihan.

Secara sosial-budaya, kegiatan ini mendorong terbentuknya budaya musyawarah, keterbukaan, dan penerimaan terhadap perbedaan pilihan politik di tingkat lokal. Dari sisi ekonomi, meskipun dampaknya tidak bersifat langsung, pemilihan Ketua RT yang legitimasi dan dipercaya warga berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan program lingkungan dan kegiatan sosial ekonomi di masa mendatang. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa pendampingan tata kelola pemilihan Ketua RT yang transparan dan partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan lingkungan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa praktik *good governance* dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan pada tingkat komunitas.

Dokumentasi Kegiatan:



Gambar 1 Sosialisasi



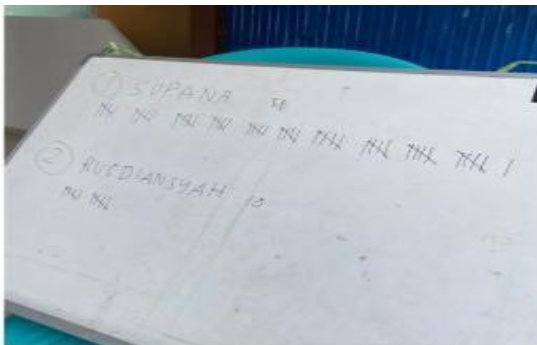
Gambar 2 Surat Suara



Gambar 3 Penyesuaian Daftar hadir dan DPT



Gambar 4 Pencoblosan



Gambar 5 Penghitungan Suara



Gambar 6 hasil Berita Acara

5. Penutup

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di RT 031 Simpang Gusti VI Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa pendampingan tata kelola pemilihan Ketua RT yang transparan dan partisipatif berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap praktik demokrasi lokal. Seluruh tahapan pemilihan, mulai dari penyusunan tata tertib, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil, dapat dilaksanakan secara tertib, terbuka, dan akuntabel. Pendampingan ini berhasil meningkatkan kualitas administrasi pemilihan melalui penyediaan perangkat yang sistematis, seperti formulir pencalonan, daftar pemilih tetap (DPT), absensi kehadiran, serta berita acara hasil pemilihan. Ketersediaan dokumen tersebut tidak hanya memperkuat akuntabilitas proses, tetapi juga meningkatkan kepercayaan warga terhadap panitia dan hasil pemilihan. Dari aspek partisipasi, tingkat keterlibatan warga tergolong baik dan mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya menentukan kepemimpinan lingkungan secara demokratis.

Proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan secara terbuka mampu meminimalkan potensi konflik serta memperkuat legitimasi Ketua RT terpilih. Secara konseptual, kegiatan ini membuktikan bahwa penerapan prinsip *good governance*—meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas—dapat diimplementasikan secara nyata di tingkat komunitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Janah et al. (2021) yang menyatakan bahwa implementasi prinsip *good governance* pada pemerintahan desa mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat, kepedulian warga terhadap proses pengambilan keputusan, serta munculnya kritik dan saran yang konstruktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan melalui tersusunnya tata tertib, DPT, berita acara, dan dokumentasi pemilihan juga mendukung hasil penelitian Basri et al.



(2021), yang menjelaskan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Meningkatnya partisipasi warga dari 55% menjadi 90% juga sejalan dengan temuan Rijal et al. (2021), yang menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap terwujudnya Good Village Governance. Semakin terbuka proses penyelenggaraan pemerintahan, semakin besar pula keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan.

Dari sisi perubahan perilaku, hasil pendampingan memperlihatkan meningkatnya kesediaan warga untuk mengikuti musyawarah, menggunakan hak pilih, menerima hasil pemilihan, serta menjaga ketertiban selama proses pemilihan berlangsung. Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman tidak hanya berhenti pada aspek kognitif, tetapi juga berdampak pada perilaku partisipatif masyarakat. Kondisi ini mendukung hasil penelitian Suhardi et al. (2023) yang menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat terdorong untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam kegiatan pemerintahan desa. Dengan demikian, pendampingan tata kelola pemilihan Ketua RT menjadi model praktik baik (*best practice*) dalam memperkuat demokrasi lokal serta membangun budaya musyawarah dan keterbukaan di lingkungan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga RT 31 Simpang Gusti VI, Kelurahan Alalak Utara, Kota Banjarmasin, yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT. Partisipasi, antusiasme, serta kepedulian Bapak, Ibu, dan seluruh warga dalam menggunakan hak pilih telah menunjukkan semangat demokrasi, kebersamaan, dan tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang lebih baik. Kehadiran dan dukungan seluruh warga menjadi kunci sukses terselenggaranya pemilihan yang berlangsung dengan tertib, aman, lancar, jujur, dan penuh rasa kekeluargaan. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, para calon Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta semua pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi kelancaran proses pemilihan.

Semoga Ketua RT yang telah terpilih dapat mengemban amanah dengan baik, menjalin komunikasi yang harmonis dengan seluruh warga, serta membawa RT 31 Simpang Gusti VI menjadi lingkungan yang semakin maju, aman, nyaman, dan sejahtera. Mari kita terus menjaga persatuan, mempererat tali silaturahmi, dan bersama-sama mendukung setiap program pembangunan demi kemajuan RT 31 Simpang Gusti VI.

Referensi

- Basri, Y. M., Findayani, T. I., & Zarefar, A. (2021). *Implementation of Good Governance to Improve the Performance of Village Governments*. Jurnal Akuntansi, 11(2), 123–136. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.123-136>
- Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). *Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Good Village Governance*. E-Jurnal Akuntansi, 31(12), 3301–3313. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i12.p20>
- Suhardi, U. U., Pribadi, U., & Losi, Z. (2023). *The Effects of Good Governance Principles: Accountability, Transparency, and Participation on Public Trust in Village Funds Management*. International Journal of Social Science and Business, 7(4). <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i4.57648>
- Yaya, R., & Sukardi. (2025). *Pengaruh Implementasi E-Government dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan Good Government Governance sebagai Variabel Pemoderasi*. Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis.



- Prianti, E. (2025). *Benerkulon Village Citizen Participation in Supporting Village Government Transparency and Accountability as Part of Public Sector Governance*. Journal of Innovation and Public Accounting, 2(1), 71–80.
- Nupsi, Kresnawati, & Nasution, S. (2025). *The Effect of Village Government Accountability and Transparency on Community Participation in Village Infrastructure Development*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
- Mufidah, L. (2025). *Transparency, Participation, and Village Development: Evidence from Village Fund Management in Prayungan, Bojonegoro*. Indonesian Journal for Entrepreneurial Review.
- Susi, S., Sukorina, D., & Uang, Y. (2026). *Model Transparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik, 8(1).
- Pratama, N. A., Rispawati, & Haslan, M. M. (2026). *Implementation of the Principle of Transparency in the Use of Village Funds*. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 14(1).
- Rachman, S. R., Wellem, K. A., & Hajar, K. I. (2026). *Trust-Based Village Financial Governance: Transparency, Accountability, Participation, and Village Fund Success*. Journal of Business Studies and Management Review.
- Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay.
- Kirkpatrick, J. D., & Kirkpatrick, W. K. (2021). *Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation*. ATD Press.
- Ajzen, I. (2020). *The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions*. Human Behavior and Emerging Technologies, 2(4), 314–324.
- OECD. (2021). *Government at a Glance 2021*. OECD Publishing.